

# **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

# **2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) merupakan sarana bagi Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur.

Dengan demikian, kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan Evaluasi yang objektif bagi Bupati Lampung Timur dalam menilai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur dan juga untuk merumuskan kebijakan– kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur dimasa mendatang dalam memenuhi harapan masyarakat akan mewujudkan *good government*.

Sukadana, 03 Februari 2025  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
  
**AGUS FIRMAN SYAH LUKMAN, S.E., M.M**  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 196829 200501 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	.....	2
1.3 RUANG LINGKUP	.....	2
1.4 GAMBARAN UMUM	.....	2
1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	.....	2
1.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA	.....	3
1.4.3 PELAKSANAAN APBD	.....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	7
2.1 VISI DAN MISI	.....	7
2.2 RENCANA KINERJA SASARAN	.....	12
2.3 INDIKATOR KINERJA	.....	12
2.4 INDIKATOR RENCANA KINERJA	.....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	37
A. METODE PENGUKURAN KINERJA	.....	37
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	.....	37
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA	.....	39
D. PENJELASAN PROGRAM ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUNAN (%)	.....	39
E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA	.....	41
F. PENJELASAN PROGRAM ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUNAN (%)	.....	41
G. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUNAN	.....	41

H.	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	.....	45
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP</b>	.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Rencana Kinerja Sasaran 1.....	13
Tabel 2.2 Indikator Rencana Kinerja Sasaran 2.....	13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	37
Tabel 3.2 Sasaran 1 Realisasi Pertumbuhan PAD Tahun 2022 s.d. 2024 .....	38
Tabel 3.3 Sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022–2024.....	39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA.....	39
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi capaian indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%) Kabupaten dengan Provinsi .....	40
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	40

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran kinerja pelaksanaan dan pengukuran kinerja kegiatan tahun 2024 yang meliputi 2 program 9 kegiatan dan 58 sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 dengan jumlah pagu anggaran belanja sebesar **Rp. 38.863.009.863,-** dan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 32.004.681.202,64,-** atau **82,35 %** dari total pagu anggaran yang diterima masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Pendapatan Tahun Anggaran 2024.

Dengan laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan Tupoksi dan dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Lampung Timur.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Laporan akuntabilitas kinerja ini mencakup kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

## **1.4 GAMBARAN UMUM**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### **1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.4.1.1 Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

#### **1.4.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **1.4.2 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur didukung oleh Aparatur



Sipil Negara sebanyak 38 orang dengan kualifikasi pendidikan lulusan SLTA sejumlah 8 orang, Sarjana (S1) sejumlah 14 orang, dan Pasca Sarjana (S2) sejumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Agus Firmansyah Lukman, S.E., M.M	Pembina Tk. I /IV.b	Kepala Badan	S2
2	Ahmad Faoji, S.Ag.,M.M	Pembina (IV/a)	Sekretaris	S2
3	Endah Renaningtiasih,SIP.,M.IP	Pembina (IV/a)	Kabid Dana Perimbangan dan Pelaporan	S2
4	Abu Yazid Bustami, S.E.,M.M	Pembina (IV/a)	Kabid Penagihan dan Pengawasan	S2
5	Ismail Gumanti Arif SIP, MM	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pendatan dan Pendaftaran	S2
6	Ndaru Yuni Setiabudi, SE.,MM	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Perencanaan dan Penetapan	S2
7	Rosmala Dewi, SI.P.,M.Si	Penata (III/c)	Kasubbid Penagihan	S2
8	Sinar Mulya Eka Putri, SE.,MM	Penata Tk. I (III/d)	Kasub Bid Perencanaan dan Pengendalian Oprasional	S2
9	R. Susastini, SE., M.Si	Pembina (IV/a)	JF Perencana	S2
10	Nur Imani Tasib, SE., M.M	Penata Tk. I (III/d)	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S2
11	Lilis Suryani, SE., M.S.Ak	Penata Tk. I (III/d)	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S2
12	Rahayu Dian Anggraini, S.Pd.,MM	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbid Pembinaan dan PENGawasan	S2
13	Irmalia Safitri, S.Sos.,MM	Pembina (IV/a)	Kasubbid Administrasi Penerimaan	S2
14	Mohammad Rendy, SH.,MH	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbig Penghitungan dan Penetapan	S2
15	Imron Umar, S.IP.,MM	Penata Muda TK I (III/b)	JFU Pengadministrasi Pajak	S2
16	Teguh Wardoyo, S.AP	Penata Muda TK I (III/b)	JFU Penata Keuangan	S2
17	Dwi Marastuti, S.E	Penata Tk. I (III/d)	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S1
18	Syaiful Saleh Sanjaya, SE	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbid Dana Perimbangan	S1
19	Uban Bertha Soebing, SE	Penata Tk I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
20	M. Hassan Albert, ST	Penata Tk I (III/d)	JFU Penata Keuangan	S1

21	Leni Marlina, SE	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana	S1
22	Sely Septaria, SE	Penata (III/c)	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S1
23	Arif Effendi, SE	Penata (III/c)	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi	S1
24	Imron Syahroni, SE	Penata (III/c)	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S1
25	Sakuan Helmi, S.M	Penata (III/c)	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran	S1
26	Wayan Suci Asih, S.IP	Penata Muda TK I (III/b)	JFU Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S1
27	Rosita Dewi, S,AP	Penata Muda TK I (III/b)	JFU Analis Laporan Keuangan	S1
28	Eva Susanti, S.AP	Penata Muda TK I (III/b)	JFU Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	S1
29	Nova Yogi Savitri	Penata Muda / III a	JFU Analis Pendapatan Daerah	S1
30	Susi Oktriani,S.AP	Penata Muda (III/a)	JFU Pengadministrasi Keuangan	S1
31	Dwi Prio Handoko	Penata Muda Tk. I / III b	JFU Pengadministrasi Umum	SLTA
32	Andhy Gustriani	Penata Muda (III/a)	JFU Pengadministrasi Umum	SLTA
33	Burhan	Penata Muda (III/a)	JFU Pengadministrasi Umum	SLTA
34	Putrawan	Penata Muda (III/a)	JFU Pengadministrasi Pajak	SLTA
35	Indro Wibowo	Penata Muda, III/a	JFU Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
36	Subadi	Penata Muda, III/a	JFU Pengadministrasi Pajak	SLTA
37	Mada Yusuf, HSB	Pengatur TK I (II/d)	JFU Pengadministrasi Umum	SLTA
38	Zainal Arifin	Pengatur (II/c)	JFU Pengadministrasi Umum	SLTA

### 1.4.3 Pelaksanaan APBD

Alokasi dana dari APBD Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 36.872.486.348,00** yang terdiri dari belanja Operasi sebesar **Rp. 36.613.948.418,00** dan belanja Modal sebesar **Rp. 258.537.930,00** dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, belanja Operasi menjadi **Rp. 38.188.410.209,00** dan Belanja Modal menjadi **Rp. 674.599.654,00** jadi jumlahnya menjadi **Rp. 38.863.009.863,00** Adapun dari Jumlah dana yang ada tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 31.345.791.247,00,-** untuk belanja Operasional dan belanja Modal terealisasi sebesar **Rp. 658.889.955,64,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	DANA DALAM DPA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	<b>BELANJA OPERASIONAL</b> - Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa	9.124.286.269,00 29.064.123.940,00	8.427.014.887,00 22.918.776.360,00
2	<b>BELANJA MODAL</b> - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	257.399.654,00 417.200.000,00	252.450.000,00 406.439.955,64
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.863.009.863,00</b>	<b>32.004.681.202,64</b>

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 juga mengelola PAD dari sektor Pajak Dari target sebesar **Rp. 87.870.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 83.550.226.924,00** atau sebesar **95,08 %**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET DALAM DPA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b> - Pajak Hotel - Pajak Restoran dan Sejenisnya - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	170.000.000,00 3.500.000.000,00 500.000.000,00 1.400.000.000,00 43.500.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 5.500.000.000,00 26.700.000.000,00 5.000.000.000,00	199.044.733,00 2.446.588.659,00 111.409.500,00 1.314.360.460,00 44.559.873.028,00 365.120.000,00 932.034.676,00 139.817.500,00 27.970.793.579,00 5.511.184.789,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>87.870.000.000,00</b>	<b>83.550.226.924,00</b>

Dari jumlah Pegawai dan Anggaran di atas dan Faktor-faktor lain dari luar maka ada beberapa permasalahan yang muncul. Adapun permasalahan utama ( *Strategic Issued* ) yang dihadapi saat ini oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai dalam mendukung kegiatan operasional
2. Perlunya penguatan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan koordinasi terpadu antara Pusat, Provinsi juga dengan mitra kerja seperti: LSM, PWI dan sebagainya.
3. Belum sadarnya masyarakat lampung timur atas pentingnya membayar pajak daerah.

Adapun Langkah-langkah dan strategi yg akan dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD
2. Penyederhanaan system dan prosedur administrasi pungutan pajak dan retribusi daerah
3. Mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari 9 pajak daerah.
4. Merasionalisasi potensi penerimaan pajak MBLB dan BPTPTB.
5. Mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memeberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
7. Membantu satgas pajak dan kolektor pajak di tiap desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Pengelolaan administrasi pemerintah pada era reformasi ini berkembang secara dinamis dan akan selalu berjalan menuju kesempurnaan-kesempurnaan yang hendak dicapai. Pengelolaan administrasi dalam pelayanannya menuntut aparatur menjadi profesional sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Sebagaimana dipahami bahwa konsep sistem administrasi modern dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan oleh atasan untuk membangun kinerja yang baik dalam rangka Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab. Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakatnya tentang kewajiban tertib administrasi untuk melindungi hak dan kepemilikan aset-aset yang mereka miliki.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai satuan kerja dalam kurun waktu tertentu yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program satuan Kerja, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan satuan kerja dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas anggaran satuan kerja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, LKjIP ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur yang dibiayai oleh APBD maupun APBN.
2. Menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebagai landasan dalam penjabaran arah dan kebijakan umum sesuai visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Untuk memudahkan koordinasi dalam rangka keterpaduan program dan kegiatan lintas sektoral.

#### **2.1 VISI DAN MISI**

##### **2.1.1 VISI**

*“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Amanah, Transparan dan Profesional Demi Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan dan Madani”*

### **2.1.2 MISI**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam visi tersebut, maka beberapa misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. mengoptimalkan penerimaan PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang ditetapkan dalam APBD, baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh dinas / instansi / pengelola penerimaan lainnya;
- b. mengawal pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia;
- c. melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan;
- d. menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif;
- e. melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sarana kerja dalam rangka mewujudkan profesionalitas kerja.

### **2.1.3 TUJUAN**

Tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin dicapai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik.

Penyusunan rencana strategis ini bertujuan yaitu :

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendapatan yang bertaqwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
- b. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pendapatan.
- c. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. Peningkatan kualitas dalam pelayanan terhadap wajib pajak.
- f. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.

#### **2.1.4. SASARAN**

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur ialah :

1. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi
2. Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah

#### **2.1.5. PROGRAM**

Program kerja operasional merupakan penjabaran secara rinci dari kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah ditetapkan. Program ini merupakan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dimaksud. Program kerja operasional yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **2.1.6. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan aktivitas dalam rangka peningkatan kerja. Kegiatan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan program kerja operasional. Kegiatan operasional yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah :
- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
  - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - Penetapan Wajib Pajak Daerah
  - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - Penagihan Pajak Daerah
  - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

## **2.2. RENCANA KINERJA SASARAN**

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) oleh legislatif dan eksekutif dengan menerapkan skala prioritas dan standar pelayanan minimum serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana tahun Pertama dari rencana strategik, target tujuan sebagai akumulasi pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam periode tahun 2021-2026. Dalam penyusunannya mengembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Adapun dalam upaya mengontrol realisasi kegiatan ditetapkan standar pengukuran dan penilaian, meliputi :

### **2.2.1. Capaian Sasaran**

Yaitu rencana yang akan dicapai sebagai akumulasi capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah beserta Perangkatnya didukung oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

### **2.2.2. Kinerja Kegiatan**

Yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tingkat alokasi sumberdaya dan sumberdana untuk menghasilkan keluaran serta hasil yang dapat dinikmati secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Lampung Timur.

## **2.3. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengukuran rencana kinerja sasaran dan kegiatan meliputi :

- 1. Indikator Kinerja Masukan (Input)**, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumberdaya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan sasaran dan atau kegiatan.

2. **Indikator Kinerja Keluaran (Output)**, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari sasaran atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Kinerja Hasil (Outcome)**, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran sasaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

## 2.4. INDIKATOR RENCANA KINERJA

Adapun indikator rencana kinerja tahun anggaran 2024 atas sasaran dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran merupakan target sasaran yang ingin atau hendak dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Adapun Indikator Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 atas Sasaran adalah sebagai berikut :

#### a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari sasaran ini ditetapkan indikator, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Indikator Rencana Kinerja Sasaran 1**

NO	INDIKATOR	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	10	%

**Tabel 2.2**

**Indikator Rencana Kinerja Sasaran 2**

NO	INDIKATOR	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	

## 2. Rencana Kinerja Kegiatan

Indikator Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024 atas Kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 7.847.514,00 dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH (Rp)
<b>Input</b> Dana	Rupiah	7.847.514,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

### 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 8.379.027,00 dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH (Rp)
<b>Input</b> Dana	Rupiah	8.379.027,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b>		

Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100
--	--------	-----

### 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 8.106.855,00 dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana Jumlah	Rupiah	8.106.855,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

### 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 6.975.342,00 Dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana SDM	Rupiah	6.975.342,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

### 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dalam rangka menunjang kebersihan dan

keamanan kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	15.000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

#### 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 8.187.479,00 dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	8.187.479,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Laporan	3
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

#### 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 8.353.607,00 dalam rangka Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b>		

Dana	Rupiah	8.353.607,00
<b>Output</b> Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Persen	100

## 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 8.819.486.269,00 dalam rangka Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	8.819.486.269,00
<b>Output</b> Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	38
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

## 9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 202.800.263,00 dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	202.800.263,00
<b>Output</b> Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Selama 12 Bulan	Dok	1
<b>Outcomes</b>		

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
--	--------	-----

#### 10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 194.146.800,00 dalam rangka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	194.146.800,00
<b>Output</b> Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

#### 11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 menyerap Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	20.000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

#### 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 9.488.194,00 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	9.488.194,00
<b>Output</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

### 13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	20.000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

### 14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	15.0000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	2
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

#### 15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 dalam rangka Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	15.0000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

#### 16. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	10.000.000,00
<b>Output</b>		

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

#### 17. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	20.000.000,00
<b>Output</b> Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12

#### 18. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 27.600.000,00 dalam rangka Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	27.600.000,00
<b>Output</b> Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12

#### 19. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	15.000.000,00
<b>Output</b> Dokumen Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12

## 20. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 10.910.000,00 dalam rangka melaksanakan. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	10.910.000,00
<b>Output</b> Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12

## 21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 55.642.880,00 dalam rangka pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b>		

Dana	Rupiah	55.642.880,00
<b>Output</b> Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	121
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100

## 22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 148.305.082,00 dalam rangka Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	148.305.082,00
<b>Output</b> Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100

## 23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 32.798.103,00 dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	32.798.103,00
<b>Output</b> Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
<b>Outcomes</b> Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

#### 24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 78.636.726,00 dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	78.636.726,00
<b>Output</b> Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1
<b>Outcomes</b> Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

#### 25. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 19.616.132,00 dalam rangka Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	19.616.132,00
<b>Output</b> jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1
<b>Outcomes</b> Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

#### 26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 14.307.332,00 dalam rangka Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	14.307.332,00
<b>Output</b>		

Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1
<b>Outcomes</b> Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

## 27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 51.490.187,00, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	51.490.187,00
<b>Output</b> Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
<b>Outcomes</b> Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

## 28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 7.112.971,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun indikator satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	7.112.971,00
<b>Output</b> Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

## 29. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 Fasilitas Kunjungan Tamu. Adapun indikator satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	20.000.000,00
<b>Output</b> Jumlah Kebutuhan Makan Minum dan Fasilitas Tamu dalam 12 Bulan	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

### 30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 227.980.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	227.980.000,00
<b>Output</b> Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12

### 31. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 125.052.345,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	125.052.345,00
<b>Output</b>		



Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

### 32. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 460.540.000,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	460.540.000,00
<b>Output</b> Jumlah Peralatan dan mesin kantor dengan adanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

### 33. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 261.397.000,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	261.397.000,00
<b>Output</b> Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

#### 34. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 269.619.651,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	269.619.651,00
<b>Output</b> Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

#### 35. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 313.274.420,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	313.274.420,00
<b>Output</b> Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

#### 36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 105.315.000,00 guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	105.315.000,00
<b>Output</b> Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

### 37. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 7.745.186,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	7.745.186,00
<b>Output</b> Jumlah surat menyurat dalam satu tahun	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

### 38. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 19.638.156.639,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	19.638.156.639,00
<b>Output</b> Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1
<b>Outcomes</b>		

Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
---	--------	-----

### 39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 2.034.637.274,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	2.034.637.274,00
<b>Output</b> Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

### 40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 49.092.345,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	49.092.345,00
<b>Output</b> Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5
<b>Outcomes</b> Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

### 41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 190.410.307,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	190.410.307,00
<b>Output</b> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara selama 12 bulan	Unit	2
<b>Outcomes</b> Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

#### 42. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 58.143.374,00 guna melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	58.143.374,00
<b>Output</b> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpeliharaan selama 12 bulan	Unit	1
<b>Outcomes</b> Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

#### 43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 20.281.280,00 guna melaksanakan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	20.281.280,00
<b>Output</b> Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3
<b>Outcomes</b> Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

#### 44. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 36.076.251,00 guna melaksanakan kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	36.076.251,00
<b>Output</b> rapat-rapat perencanaan pajak daerah	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 45. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 302.531.300,00 guna melaksanakan kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	302.531.300,00
<b>Output</b>		

tersedianya peraturan kepala daerah dan SOP pajak daerah	Dokumen	8
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 46. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 580.726.312,00 guna melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	580.726.312,00
<b>Output</b> Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 47. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 226.700.000,00 guna melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	226.700.000,00
<b>Output</b> Tersedianya Peta Objek Pajak PBB-P2 Berbasis Digitalisasi	Unit	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 48. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 271.783.361,00 guna melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	271.783.361,00
<b>Output</b> Lebih Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Akan Pentingnya Pajak	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 49. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 1.048.399.005,00 guna melaksanakan kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	1.048.399.005,00
<b>Output</b> Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 50. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 205.000.000,00 guna melaksanakan kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	205.000.000,00
<b>Output</b> Tercapaiannya Penilaian Individu, Verifikasi BPHTB Dan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2	OP	8
<b>Outcomes</b>		



Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100
---	--------	-----

#### 51. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 475.135.800,00 guna melaksanakan kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	475.135.800,00
<b>Output</b> tersedianya data penetapan pajak yang akurat	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 52. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 246.400.000,00 guna melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	. 246.400.000,00
<b>Output</b> terlaksananya layanan keliling di kecamatan atas permohonan wajib pajak untuk usulan objek pajak baru, mutasi, pembetulan, keberatan dan penghapusan	Pelayanan	9
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 53. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 251.967.935,00 guna melaksanakan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah. Adapun indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
-----------	--------	--------

<b>Input</b> Dana	Rupiah	251.967.935,00
<b>Output</b> Jumlah Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	10
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 54. Penagihan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 1.028.800.400,00 guna melaksanakan kegiatan Penagihan Pajak Daerah. Adapun Indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	1.028.800.400,00
<b>Output</b> tercapainya penerimaan pajak daerah	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 55. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 199.274.300,00 guna melaksanakan kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Adapun Indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	199.274.300,00
<b>Output</b> tercapainya perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran kurang bayar pajak, besaran sanksi denda dan besaran pajak lebih bayar atas pengaduan wajib pajak	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 56. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 236.164.587,00 guna melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Adapun Indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	236.164.587,00
<b>Output</b> Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 57. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 331.019.684,00 guna melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Adapun Indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	331.019.684,00
<b>Output</b> Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

#### 58. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 52.592.344,00 guna melaksanakan kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Adapun Indikator, satuan ukuran serta jumlah rencana kegiatan ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH
<b>Input</b> Dana	Rupiah	52.592.344,00

<b>Output</b> Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah	Laporan	1
<b>Outcomes</b> Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persen	100

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik secara transparan dan sistematis. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 dan 54 Tahun 2014.

#### **A. METODE PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan PAD}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 8,5$	: Sangat Berhasil
$7,0 < X < 8,5$	: Berhasil
$5,5 < X < 7,0$	: Cukup Berhasil
$X < 5,5$	: Tidak Berhasil

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, tercermin dari berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunannya mengembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	10%	5%	50%
2.	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dalam bidang pendapatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	79	102,60%

Dari tabel pengukuran diatas dapat dilihat bahwa Capaian PAD sebesar 50% menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan masih di bawah target yang ditetapkan. Serta, Capaian IKM melebihi target, mencerminkan meningkatnya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

### 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

**Tabel 3.2**  
**Sasaran 1**  
**Realisasi Pertumbuhan PAD Tahun 2022 s.d 2024**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2022	Rp. 326.715.135.208,00	Rp. 195.574.745.737,06	5%	50%
2023	Rp. 235.659.159.420,00	Rp. 196.136.238.928,38	5%	50%
2024	Rp. 87.870.000.000,00	Rp. 83.550.226.924,00	5%	50%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian PAD tahun 2024 menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi meskipun dengan nilai target yang lebih kecil secara nominal. Dengan realisasi sebesar Rp. 83.550.226.924,00 dari target, menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi pencapaian target tahunan, meskipun secara nilai absolut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mendapat Target PAD sebesar Rp. 87.870.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2024 Terealisasi sebesar Rp. 83.550.226.924,00 atau 95,08% yang terdiri dari :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>228.056.655.257,00</b>	<b>205.672.554.201,17</b>	<b>90,18%</b>
	<b>Pajak</b>	<b>87.870.000.000,00</b>	<b>83.550.226.924,00</b>	<b>95,08%</b>
	- Pajak Hotel	170.000.000,00	199.044.733,00	117,09%
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	2.446.588.659,00	69,90%
	- Pajak Hiburan	500.000.000,00	111.409.500,00	22,28%
	- Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.314.360.460,00	93,88%
	- Pajak Penerangan Jalan	43.500.000.000,00	44.559.973.028,00	102,44%
	- Pajak Parkir	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64%
	- Pajak Air Tanah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50%
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan	5.500.000.000,00	139.817.500,00	2,54%
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan	26.700.000.000,00	27.970.793.579,00	104,76%
	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.511.184.789,00	110,22%
2	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>5.626.300.000,00</b>	<b>3.749.508.473,00</b>	<b>66,64%</b>
	- Retribusi Jasa Umum	2.584.650.000,00	2.233.879.000,00	18,03%
	- Retribusi Jasa Usaha	1.432.300.000,00	779.972.864,00	54,46%
	- Retribusi Perizinan Tertentu	1.609.350.000,00	735.656.609,00	45,71%
3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>11.600.000.000,00</b>	<b>11.600.000.000,00</b>	<b>27,63%</b>
	- Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	27,63%
4	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>122.960.355.257,00</b>	<b>115.167.905.438,58</b>	<b>93,66%</b>

**Tabel 3.3**  
**Sasaran 2**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022–2024**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	6,5	7,6	117,00%
2023	7,6	7,9	103,95%
2024	77	79	102,60%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terus meningkat secara konsisten selama periode 2022 hingga 2024.

Pada tahun 2022, target IKM ditetapkan sebesar 6,5 dan berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 7,6 menghasilkan capaian sebesar 117%. Ini mencerminkan kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan target 7,6 dan realisasi 7,9. Capaian mencapai 103,95%, mengindikasikan keberhasilan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2024, meskipun target dinaikkan menjadi 77 realisasi di angka 79 dengan capaian 102,60%, menunjukkan konsistensi kinerja layanan yang tinggi. Selama tiga tahun berturut-turut capaian IKM selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

### **3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur**  
**Tahun 2024 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

Indikator	Target RPJMD	Realisasi 2024	Capaian (%)
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	10%	5%	50%
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	79	100%



Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode RPJMD menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari indikator utama yang ditetapkan:

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 50% dari target RPJMD, menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 100% dari target RPJMD, menandakan kualitas pelayanan publik yang sesuai harapan.

Secara keseluruhan, indikator pelayanan menunjukkan kecenderungan positif, namun pada aspek pendapatan daerah diperlukan strategi intensif agar target jangka menengah dapat dicapai secara optimal.

#### 4. Perbandingan realisasi capaian indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%) Kabupaten dengan Provinsi.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi capaian indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%) Kabupaten dengan Provinsi**

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	11	12
Provinsi Lampung	4,7	5

Namun dalam pelaksanaan pemungutan PAD masih terdapat beberapa kendala / permasalahan dilapangan diantaranya (berikut solusi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Dareah Daerah) :

- 1) Data PBB-P2 yang ada didesa sebagian sulit ditemukan bukti pembayarannya hal ini dikarenakan hilang atau ganti kepengurusan / ganti kepemilikan, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang data agar tidak terjadi penumpukan data piutang pajak.
- 2) Masih banyaknya kendala didesa mengenai Objek Pajak PBB-P2 sehingga perlu pendataan ulang SPPT-P2.
- 3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan data ulang penerapan pajak.

### C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.6**  
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	50%	82,50%	60,72%
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,60%	82,35%	124,59%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa PAD menunjukkan efisiensi rendah karena pencapaian lebih kecil dari anggaran yang diserap. Sedangkan, IKM sangat efisien karena hasil melebihi target dengan penggunaan anggaran optimal.

### D. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENDANAAN		
				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	5	10	11	12
05	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.370.438.584,00	27.473.136.359,64	82,33
			I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.849.824,00	26.276.333,00	41,81
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00	2.164.000,00	27,58
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027,00	2.393.400,00	28,56
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855,00	1.882.000,00	23,21
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342,00	2.628.335,00	37,68
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000,00	14.875.998,00	99,17
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	8.187.479,00	1.049.000,00	12,81

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607,00	1.283.600,00	15,37
			<b>II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.295.921.526,00</b>	<b>8.576.006.002,00</b>	<b>92,26</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.819.486.269,00	8.128.514.887,00	92,17
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.800.263,00	202.742.445,00	99,97
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.146.800,00	172.416.431,00	88,81
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	19.231.990,00	96,16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194,00	8.627.007,00	90,92
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	14.948.828,00	74,74
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	15.000.000,00	14.868.086,00	99,12
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00	14.656.328,00	97,71
			<b>III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>83.510.000,00</b>	<b>62.041.468,00</b>	<b>74,29</b>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	7.778.760,00	77,79
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	17.394.811,00	86,97
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	27.600.000,00	21.268.155,00	77,06
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	11.064.642,00	73,76
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.910.000,00	4.535.100,00	41,57

			<b>IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>203.947.962,00</b>	<b>163.975.796,00</b>	<b>80,40</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.642.880,00	53.840.000,00	96,76
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	148.305.082,00	110.135.796,00	74,26
			<b>V. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>451.941.451,00</b>	<b>364.670.727,00</b>	<b>80,69</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.798.103,00	32.776.080,00	99,93
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.636.726,00	77.062.355,00	98,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.616.132,00	11.328.626,00	57,75
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.307.332,00	14.105.450,00	98,59
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.490.187,00	51.402.955,00	99,83
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.112.971,00	3.181.760,00	44,73
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.931.880,00	99,66
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.980.000,00	154.881.621,00	67,94
			<b>VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.273.801.416,00</b>	<b>1.249.016.955,64</b>	<b>98,05</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.052.345,00	124.353.500,00	99,44
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.540.000,00	457.185.500,00	99,27
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.619.651,00	260.045.000,00	96,45
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.274.420,00	308.332.620,00	98,42

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.315.000,00	99.100.335,64	94,10
			<b>VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.680.539.099,00</b>	<b>16.815.514.690,00</b>	<b>77,56</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.745.186,00	7.706.270,00	99,50
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.638.156.639,00	15.078.590.129,00	76,78
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.034.637.274,00	1.729.218.291,00	84,99
			<b>VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>317.927.306,00</b>	<b>215.634.388,00</b>	<b>67,83</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.092.345,00	33.554.650,00	68,35
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.410.307,00	111.960.988,00	58,80
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.143.374,00	50.638.250,00	87,09
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.281.280,00	19.480.500,00	96,05
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.492.571.279,00</b>	<b>4.531.544.843,00</b>	<b>82,50</b>
			<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>5.492.571.279,00</b>	<b>4.531.544.843,00</b>	<b>82,50</b>
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	36.076.251,00	34.485.070,00	95,59
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	302.531.300,00	218.885.615,00	72,35

			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	580.726.312,00	315.895.463,00	54,40
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	226.700.000,00	135.210.572,00	59,64
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	271.783.361,00	218.924.587,00	80,55
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.048.399.005,00	1.031.880.083,00	98,42
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	205.000.000,00	157.140.988,00	76,65
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	475.135.800,00	429.679.190,00	90,43
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	246.400.000,00	222.979.533,00	90,49
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	251.967.935,00	227.739.491,00	90,38
			Penagihan Pajak Daerah	1.028.800.400,00	877.350.867,00	85,28
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	199.274.300,00	178.387.319,00	89,52
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	236.164.587,00	231.122.654,00	97,87
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	331.019.684,00	200.289.504,00	60,51
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	52.592.344,00	51.573.907,00	98,06

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan adalah ketepatan dalam menentukan faktor–faktor kunci yaitu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan upaya–upaya pencapaian tersebut. Faktor – faktor tersebut antara lain:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang professional
- b. Tersedianya anggaran yang cukup dan memadai
- c. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak
- d. Komitmen dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat tentang penting dan manfaat pendapatan dari sektor pajak.
- e. Terciptanya keamanan yang kondusif.

Selanjutnya Untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan diperlukan suatu kajian serta evaluasi kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menjalani tugas-tugas pengawasan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur (internal). Adapun analisa lingkungan internal yang meliputi analisa kekuatan dan kelemahan, dan Adapun analisa lingkungan eksternal yang meliputi analisa peluang dan ancaman Badan Pendaoatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Internal**

##### **1. Kekuatan (Strength)**

- a) Tersedianya jumlah SDM yang cukup memadai.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- c) Adanya dukungan kebijakan dan Anggaran (APBD) pemerintah.
- d) Tersedianya peraturan dan perundang-undangan.
- e) Terjalinnnya koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah pusat dan propinsi dalam hal program kerja.

##### **2. Kelemahan (Weakness)**

- a) Terbatasnya data base.
- b) Terbatasnya jumlah tenaga teknis.
- c) Kurangnya sarana komunikasi untuk menunjang kegiatan koordinasi dan operasional di lapangan.

#### **b. Lingkungan Eksternal**

##### **1. Peluang (Opportunity)**

- a) Tersedianya lembaga diklat/teknis
- b) Makin berkembangnya teknologi baik di sektor pendapatan.
- c) Tupoksi kelembagaan yang jelas
- d) Dukungan anggaran APBD.
- e) Kesadaran masyarata akan kewajiban membayar pajak

## 2. Ancaman (Threatness)

- a) Pesatnya pertumbuhan objek dan subjek pajak.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak.
- c) Kurangnya kesadaran satuan kerja dalam menyampaikan data base dan informasi bidang perpajakan.

Adapun solusi untuk meraih keberhasilan atau progres yang meningkat dan mengurangi kegagalan adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dan peluang yang ada serta berusaha sekuat tenaga meminimalisir kelemahan dan ancaman. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan dana/anggaran yang juga terbatas diharapkan Badan Pendapatan Daerah tetap dapat melakukan kerja yang terbaik dengan menerapkan efektifitas dan efisiensi dari sumber daya yang ada.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki banyak program unggulan yang menunjang keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya Program-program tersebut dibiayai oleh APBD.

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah berhasil melaksanakan sebagian besar program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024

### F. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk belanja dari APBD Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah **Rp. 36.872.486.348,00** dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 menjadi **Rp. 38.863.009.863,00**. Adapun dari Jumlah dana yang ada tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 32.013.271.702,6**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	33.370.438.584,00	27.473.136.359,64	82,33



2	DAERAH KABUPATEN/KOTA  PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.492.571.279,00	4.531.544.843,00	82,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.863.009.863,00</b>	<b>32.004.681.202,64</b>	<b>82,35</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta sumber daya manusia dan dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan tindaklanjut dari Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2024.

Realisasi PAD mencapai 95,08% dari target, dengan beberapa sektor pajak bahkan melampaui target, seperti Pajak Hotel (117,09%) dan Pajak Penerangan Jalan (102,44%). Namun, beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hiburan (22,28%) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (2,54%), masih jauh dari target, menunjukkan perlunya peningkatan strategi pemungutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 79 dari target 77 menandakan bahwa pelayanan publik dalam bidang pendapatan daerah mengalami peningkatan yang baik.

Berdasarkan evaluasi kinerja, nilai capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2024 dikategorikan sedang atau berhasil.

Demikian LKjIP ini disusun dengan harapan menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada masa-masa mendatang.

Sukadana, 03 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M**

Pejabat Tk. I /IV.b

NIP. 19829 200501 1 004